**Analisis Permasalahan Edhy Prabowo Dihubungkan atau Sangkutpaut dengan Nilai Pancasila**

****

**Disusun Oleh:**

 Moh. Zephan Kartadilaga

2052011049

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum**

 **Universitas Lampung**

Kasus ini bermula saat Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. kemudian menunjuk Andreu dan Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). KPK menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Berawal dari pembukaan kran benih lobster yang sebelumnya dilarang, dan berakhir dengan suap. Tersangka lainnya adalah Stafsus Menteri KKP, Safri dan Andreu Pribadi Misata; Pengurus PT ACK, Siswadi; staf isteri Menteri KKP, Ainul Faqih; Amiril Mukminin; dan Direktur PT DPP, Suharjito. Andreu Pribadi Misata dan Amiril Mukminin akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada 26 November 2020, setelah sebelumnya menjadi buronan KPK.



 Jika kita lihat apa yang sudah terjadi sampai saat ini, Edhy Prabowo bukanlah satu-satunya menteri yang namanya terseret dalam kasus korupsi. Pada tahun 2009, Siti Fadilah yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan, terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis departemen kesehatan dari dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Pada tahun 2012 Andi Malarangeng terjerat dalam kasus korupsi dalam proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Pekolah Olahraga Nasional (P3SON). Pada tahun 2018 Idrus Marham diduga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1, dan berakhir sebagai tersangka. Ini artinya, kejadian seperti ini terus-menerus berulang. Menteri yang seharusnya menjadi kaki tangan Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kewajiban bernegara, malah menjadi salah satu orang yang “menghancurkan” Negaranya sendiri. Bahkan dalam kasus kali ini, staff khusus kementrian ikut terlibat. Seharusnya, Presiden lebih berhati-hati dan harus memikirkan lebih matang lagi, dalam mengangkat menteri-menteri yang akan membantunya nanti, agar kejadian seperti ini bisa berhenti dan tidak akan terulang kembali. Jika kita sangkutpautkan dengan nilai Pancasila, kasus ini sangat bertentangan dengan sila ke 5 Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, kasus ini bukannya memberikan keadilan kepada rakyat, namun malah merugikan. Dan menurut saya, ini juga melanggar sila ke 3 dari Pancasila, yaitu “persatuan Indonesia”, kejadian ini bisa saja memecah belah Negara kita, rakyat bisa saja menjadi tidak percaya kepada pemerintah, diakibatkan kejadian yang sama terus-menerus terulang.

Sumber:

* <https://nasional.tempo.co/amp/1409186/4-hal-seputar-kasus-edhy-prabowo-ada-calegpdip-sampai-belanja-di-hawaii>
* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201126012548-12-574574/kronologi-kasusedhy-prabowo-awalnya-sk-berakhir-di-kpk>
* https://wow.tribunnews.com/amp/2018/08/25/inilah-daftar-menteri-di-indonesia yangtersandung-kasus-korupsi?page=all